

KUASA MENJUAL SEBAGAI SARANA EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN

Kuasa Menjual sebagai Sarana Eksekusi Obyek Hak Tanggungan

IRMAWATI

030315626

SKRIPSI FH

2006

85

Prof. Dr. H. Moh. Isnaeni, S.H., MS.

Karakteristik klausula kuasa menjual dalam perjanjian kuasa sebagai bagian dan perjanjian pemberian hak tanggungan digolongkan dalam perjanjian obligatoir karena perjanjian tersebut sumber dan perikatan sehingga menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya. Kuasa menjual berkaitan dengan kedudukan Pasal 1813 BW merupakan bentuk penyimpangan dan Pasal 1813 BW yang bersifat terbuka atau *Regelentrechts*. Selain itu kuasa menjual merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa atau biasa disebut dengan kuasa mutlak.

Kuasa Menjual, Obyek Hak Tanggungan

BUKU

1. Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
2. Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 .
3. -----, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
4. Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
5. Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
6. _____, ' *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
7. Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Tanggungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

8. Nieuwenhuis, J .H, *Pokok-pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saragih)*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985
9. Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
10. Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000
11. Subekti, R, *Aneka Perjanjian Cetakan kesepuluh*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
12. _____ ' dan R. Tjitrosudibio, *Terjemahan Burgerlijk Wetboek (B. W)*, S. 1847-23, cetakan XXVIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-bellda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1.
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.

INSTRUKSI MENTERI

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

SITUS INTERNET

[http: //www.yahoo.com/](http://www.yahoo.com/)